**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang capaian kinerjanya berasal dari organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga setiap organisasi perangkat daerah diharapkan untuk menyampaikan LKPJ OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

* 1. **Gambaran Umum OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organiasasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Gambar 1**

**Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



*Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng*

*Titik Koordinat : -6,121287o, 120,466487o*

*e-mail :* [*pmdslyr@gmail.com*](mailto:pmdslyr@gmail.com)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.  Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri.

**Tabel. 1.1**

**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun**

**di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun** | **Tahun** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Desa Mandiri | 0 | 3 | 14 | 22 |
| 2 | Desa Maju | 8 | 22 | 17 | 17 |
| 3 | Desa Berkembang | 46 | 44 | 42 | 37 |
| 4 | Desa Tertinggal | 25 | 12 | 8 | 6 |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 81 | 81 | 81 | 81 |

Sumber Data: Dinas Pember**d**ayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir (2021-2024) perkembangan status desa sangat baik, dimana disetiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah status desa mandiri yang sangat signifikan, bahkan melebihi target setiap tahunnya, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya. namun pada 3 (tiga) tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil mengentaskan desa dengan status sangat tertinggal menjadi desa tertinggal.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

* 1. **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

* + - 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
      2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
      3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
      4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
      5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Peraturan Bupati. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organiasasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
8. Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
9. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat) (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
10. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
11. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
12. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);

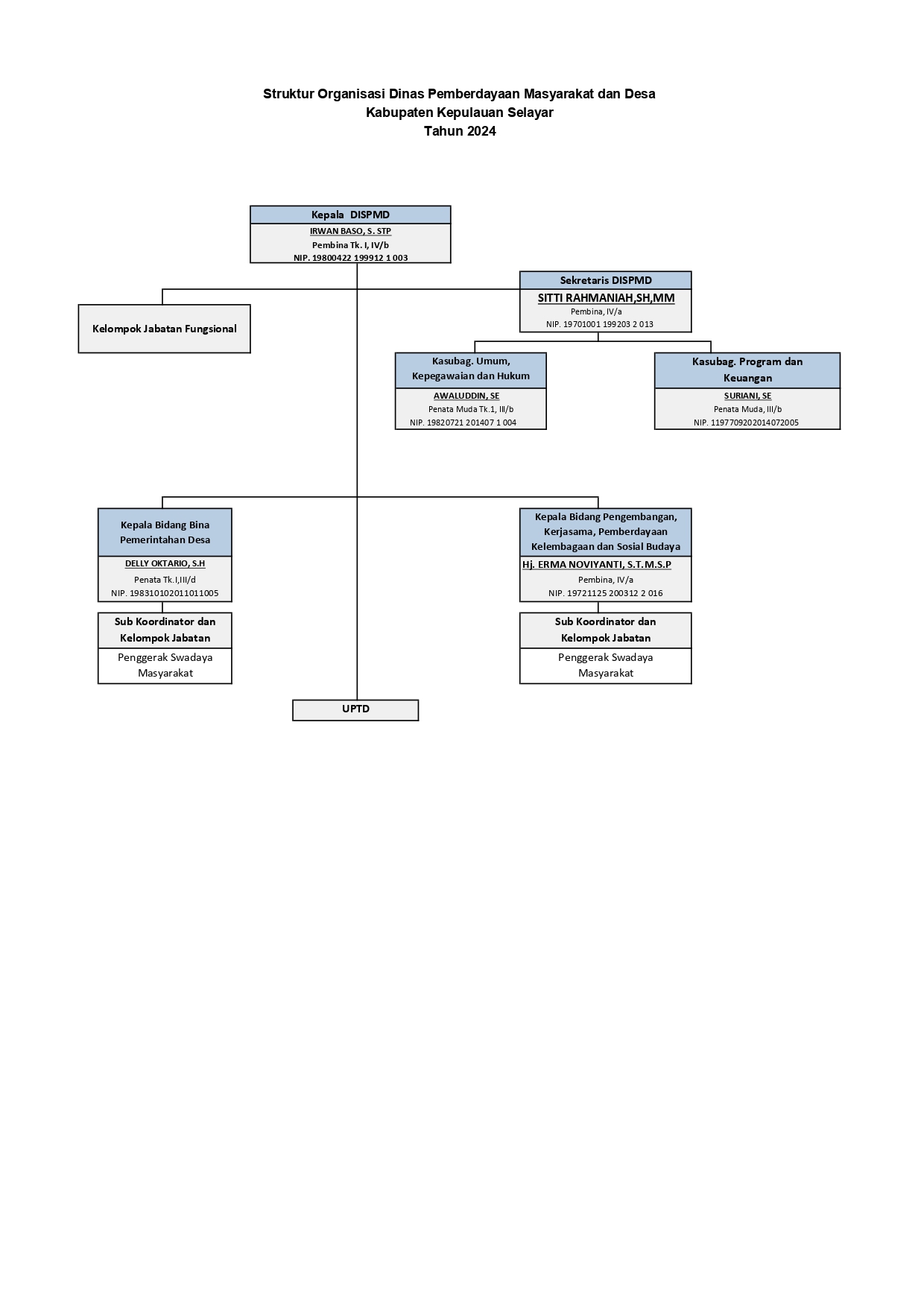
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.

**Bagan 1.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Tahun 2024**



* 1. **Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural**

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2024**

| NO | PENDIDIKAN | GOLONGAN | | | | | | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | PHL | SUKARELA |
| 1 | SD | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SLTP | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SLTA | - | 1 | 2 | - | 11 | - | 14 |
| 4 | D III | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 5 | S1 | - | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
| 6 | S2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
|  | JUMLAH |  | 1 | 14 | 2 | 23 | - | 40 |

**Tabel 1.3**

**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2024**

| **No.** | **Jabatan** | **Jenis Jabatan** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kepala Dinas PMD | Pimpinan Tinggi Pratama | 1 |
| 2. | Sekretaris DISPMD | Administrator | 1 |
| 3. | Kepala Bidang Pemerintahan Desa | Administrator | 1 |
| 4. | Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat | Administrator | 1 |
| 5. | Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum | Pengawas | 1 |
| 6. | Kasubag. Program Dan Keuangan | Pengawas | 1 |
| 7. | Penggerak Swadaya Masyarakat | Fungsional | 4 |
| 8. | Pengadministrasi Perkantoran | Pelaksana | 3 |
| 9. | Penelaah Teknis Kebijakan | Pelaksana | 2 |
| 10. | Pengelola Data dan Informasi | Pelaksana | 2 |
| **Jumlah** | |  | 17 |

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 3.831,800.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Rupiah ) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.4.**

**Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja**

**pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tahun 2024**

| **No** | **Jenis Belanja** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja Operasi | 3.801.800.000,00 | 3.575.442.416,00 | 94,05 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1.819.760.000,00 | 1.644.548.430,00 | 90,37 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.682.040.000,00 | 1.630.893.986 | 96,96 |
| 1.3 | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,00 |
| 2 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | 29.100.000 | 97,00 |
| 2.1 | Belanja Peralatan dan Mesin | 30.000.000,00 | 29.100.000 | 97,00 |
| 2.2 | Belanja Bangunan dan Gedung | - |  | - |
|  | **Jumlah** | **3.831.800.000,00** | **3.604.542.416,00** | **94,07** |

Anggaran Pokok DISPMD pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.831.800.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.819.760.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.682.040.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.604.542.416,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), atau sekitar 94,07%. Sisa anggaran 5,93% atau sebesar Rp. 227.257.584,-, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.175.211.570,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujun Puluh Rupiah).

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 2.1**

**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **NO** | **URUSAN PEMERINTA- HAN** | **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA** | **KEBIJAKAN** | **URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERMASALAHAN** | **UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN** | **TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  | **9** | **10** |
| 1 | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa** | **RKPD Tahun 2024** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **100 %** | **98,41%** |  |  |  |
| **Alokasi Anggaran**  **Rp. 245.858.300,-** | **Realisasi Anggaran**  **Rp. 241.965.800,-** |  |  |  |
|  |  |  | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Alokasi Anggaran**  **Rp. 245.858.300,-** | **Realisasi Anggaran**  **Rp. 241.965.800,-** |  |  |  |
| 1.1 |  |  | DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 81 Desa  (1 Dokumen) | 81 Desa  (1 Dokumen) |  |  |  |
| Alokasi Anggaran  Rp. 49.893.000,- | Realisasi Anggaran  Rp. 49.432.500,- |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 3 Produk Hukum Desa | 3 Produk Hukum Desa |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 10.528.000,- | Realisasi Anggaran  Rp. 9.737.000,- |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 81 Desa  (1Dokumen) | 81 Desa  (1Dokumen) |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 14.579.000,- | Realisasi Anggaran  Rp. 13.773.000,- |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa | 16 Desa | 16 Desa |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 20.858.300,- | Realisasi Anggaran  Rp. 19.023.300,- |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 150.000.000,- | Realisasi Anggaran  Rp. 150.000.000,- |  |  |  |
| 2 |  |  | **RKPD Tahun 2024** | **Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat** | **100 %** | **99,65 %** |  |  |  |
|  |  |  | **Alokasi Anggaran**  **Rp. 1.184.141.700,-** | **Realisasi Anggaran**  **Rp. 1.179.999.000,-** |  |  |  |
|  |  |  | **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Alokasi Anggaran**  **Rp. 1.184.141.700,-** | **Realisasi Anggaran**  **Rp. 1.179.999.000,-** |  |  |  |
| 2.1 |  |  | DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 16.624.000,- | Realisasi Anggaran  Rp. 13.619.000,- |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 12.517.700,- | Realisasi Anggaran  Rp. 11.890.800,- |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  | Alokasi Anggaran  Rp. 1.155.000.000,- | Realisasi Anggaran  Rp1.154.489.600,- |  |  |  |

Pada Tahun 2024, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dari 5 (lima) program yang menjadi kewenangan DISPMD, hanya 3 (Tiga) program yang dijalankan (2 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah).

Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun anggaran 2024 berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah dengan anggaran sebesar Rp.22.995.500,- (Dua Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.017.100.00,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 74,01 %, dengan uraian sub kegiatan :
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.995.500 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.148.000,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 65,01 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan SKPD
4. PenKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.557.200,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 82,86 %, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.591.400,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 79,57%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupian Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.659.300,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 82,97%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2024.
7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.716.800,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 85,84 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2024.
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.598.800- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 79,94 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
9. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.645.800,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 82,28%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Bupati Tahun 2023.
10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.819.460.000,,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.762.856.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96, 89 %, dengan uraian sub kegiatan :
11. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp.1.811.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.630.377.071,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 90,00% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.623.900,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 81,20 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua Juta Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 1.654.800,- ( Satu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 82,74 % dengan output tersedianya Laporan bahan tanggapan dari hasil pemeriksaan
14. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.246.893.500 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 238.585.219,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 96,63%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.30.108.700,- (Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.25.194.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 83,68%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp.1.685.200- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.496.800,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 88,81%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.7.781.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.5.164.900- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah Rupiah) atau sebesar 66,38 %, dengan output tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
18. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
19. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 205.350.600,- (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 204.761,719,- (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 99,71%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97,00%, dengan rincian sub kegiatan :

* Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit laptop yang akan menunjang kelancaran administrasi.

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 198.032.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 184.587.387,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 93,21 %, dengan rincian sub kegiatan :
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 84.032.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ) dan realisasinya sebesar Rp. 75.606.490,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 89,97 %, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 114.000.000- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 108.980.897- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,60 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.279.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.73.620.380- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 83,40 %, dengan rincian sub kegiatan :
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.130.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 37.431.000,- (Tiga Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 91,01%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 34.480.000- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.309.380,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 79,20%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 4.470.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 690.500,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 15,45% . Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 8.199.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 8.189.500,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,88%. Adapun Output, terpeliharanya teras kantor dan ventilasi ruangan kantor.
9. **Program Administrasi Pemerintahan Desa,**

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.858.300,- ( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 241.985.800,- ( Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah ) atau 98,41%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

* Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 49.893.000,- ( Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu) dan terealisasi sebesar Rp. 49.432.500,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,08 % dengan ouput 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
* Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.528.000,- ( Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp. 9.737.000,- ( Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) atau 92,49 % dengan output kegiatan 3 (tiga) Produk Hukum Desa antara lain :
* Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, tanggal 29 Februari 2024.
* Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 61/I/Tahun 2024, tanggal 26 Januari 2024.
* Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa, tanggal 29 November 2024
* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.579.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.773.000,- atau 94,47 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.
* Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa yaitu Desa Patilereng, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Patikarya, Desa Binangasombaya, Desa Lowa, Desa Parak, Desa Kohala, Desa Bungaiya, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Kayu Bauk, Desa Desa Bontotangnga, Desa Maharayya, Desa Barat Lambongan, dan Desa Buki Timur.

Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten.

Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar, di tahun 2024, terdapat 57 bumdes yang aktif, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif. Rincian bumdes yang ada di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan**

**Di Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **NO.** | **KECAMATAN** | **DESA** | **NAMA BUMDES** | **STATUS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIF** | **TIDAK AKTIF** |
| ***1*** | ***2*** |  | ***4*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | BONTOHARU | BONTOTANGNGA | Tatanan Baru | √ | - |
| 2 | BONTOSUNGGU | BUMDes Lestari | √ | - |
| 3 | KALEPADANG | Usaha Ekonomi Rakyat | √ | - |
| 4 | BONTOBORUSU | Maccini Sombala | - | √ |
| 5 | KAHU-KAHU | Je'ne Kahu-Kahu | - | √ |
| 6 | BONTOLEBANG | Gusung Jaya | √ | - |
| 7 | BONTOSIKUYU | HARAPAN | Berkah Harapan | √ | - |
| 8 | LOWA | Benteng Sudu-Sudu | √ | - |
| 9 | APPATANAH | Sipakullong | √ | - |
| 10 | LAIYOLO BARU | Laybar Jaya |  | √ |
| 11 | LANTIBONGAN | Baji'minasa | √ | - |
| 12 | PATIKARYA | Terang Surya | √ | - |
| 13 | PATILERENG | Baloka Mandiri | √ | - |
| 14 | BINANGA SOMBAIYA | Jaya Bhineka | √ | - |
| 15 | LAIYOLO | Batu Putih | √ | - |
| 16 | TAMBOLONGAN | Bonto Bulaeng | √ | - |
| 17 | POLASSI | Surya Mandiri | √ | - |
| 18 | KHUSUS BAHULUANG | Jaya Abadi | √ | - |
| 19 | BONTOMANAI | POLEBUNGONG | Karya Bersama | - | √ |
| 20 | MARE-MARE | Panca Usaha | √ | - |
| 21 | BONEA MAKMUR | Harapan | - | √ |
| 22 | JAMBUIYA | Abadi Jaya | √ | - |
| 23 | BONTOMARANNU | Marannu | √ | - |
| 24 | BONEA TIMUR | Bintang Timur | √ | - |
| 25 | BARUGAIYA | Baruga Bersatu | √ | - |
| 26 | PARAK | Mitra Jaya | √ | - |
| 27 | BONTOKORAANG | Masagena | √ |  |
| 28 | KABURU | Bukit Harapan | √ | - |
| 29 | B U K I | BUKI | Buki Mandiri | - | √ |
| 30 | LALANG BATA | Pesona Bakti | - | √ |
| 31 | BALANG BUTUNG | Karya Bersama | - | √ |
| 32 | KOHALA | Minasatekne | √ | - |
| 33 | BONTOLEMPANGAN | Assamaturu | √ | - |
| 34 | MEKAR INDAH | Semangat Baru | √ | - |
| 35 | BUKI TIMUR | Buki Mandiri | √ | - |
| 36 | BONTOMATENE | BARAT LAMBONGAN | Tanjung Harapan | √ | - |
| 37 | BONTONA SALUK | Sejahtera | √ | - |
| 38 | PAMATATA | Tanah Pesisir | √ | - |
| 39 | ONTO | Passiana' | √ | - |
| 40 | MAHARAYYA | Suka Maju | - | √ |
| 41 | TANETE | Bumdes Tanete | √ | - |
| 42 | MENARA INDAH | Mercusuar Mandiri | - | √ |
| 43 | BUNGAIYA | Pesona Mandiri | √ | - |
| 44 | KAYU BAUK | Kaili Mandiri | √ | - |
| 45 | TAMALANREA | Semangat Baru | √ | - |
| 46 | PASIMASUNGGU | KEMBANG RAGI | Kembang Ragi Jaya | √ | - |
| 47 | MAMINASA | Baji' Minasa | - | √ |
| 48 | TANAMALALA | Sentosa | - | √ |
| 49 | LABUANG PAMAJANG | Teluk Harapan | √ | - |
| 50 | MASSUNGKE | Mitra Sejati | √ | - |
| 51 | BONTOSAILE | Cahaya Maju | √ | - |
| 52 | TELUK KAMPE | Anugrah Jaya | √ | - |
| 53 | PASIMASUNGGU TIMUR | BONTOBULAENG | Maju Bersama | √ | - |
| 54 | BONTOBARU | Baji' Pa'mai | - | √ |
| 55 | BONTOMALLING | Usaha Baru | - | √ |
| 56 | LEMBANG BAJI | Bonesialla | - | √ |
| 57 | BONTOJATI | Maju Bersama | √ | - |
| 58 | UJUNG | Cahaya Ujung | - | √ |
| 59 | PASILAMBENA | KALAOTOA | Kalaotoa Jaya | √ | - |
| 60 | LEMBANG MATENE | Muda Mandiri | √ | - |
| 61 | GARAUPA | Mandiri Bersama | √ | - |
| 62 | PULO MADU | Bumi Putra Mandiri | - | √ |
| 63 | KARUMPA | Karya Mandiri | √ | - |
| 64 | GARAUPA RAYA | Berkah Abadi | √ | - |
| 65 | TAKABONERATE | KAYUADI | Masoong Baji | - | √ |
| 66 | JINATO | Sifamase Mase | - | √ |
| 67 | TARUPA | Harapan Maju | - | √ |
| 68 | NYIUR INDAH | Passengkaang | √ | - |
| 69 | LATONDU | Sipatuo | - | √ |
| 70 | RAJUNI | Tunas Mulia | - | √ |
| 71 | BATANG | Passamaturukang | √ | - |
| 72 | TAMBUNA | Pasir Putih | - | √ |
| 73 | KHUSUS PASITALLU | Barakke' | √ | - |
| 74 | PASIMARANNU | BONEA | Taka Bassi | - | √ |
| 75 | BATU BINGKUNG | Anugerah Sejahtera | √ | - |
| 76 | LAMBEGO | Kalao Lambego | √ | - |
| 77 | MAJAPAHIT | Abadi | √ | - |
| 78 | BONERATE | Karya Mandiri | √ | - |
| 79 | KOMBA-KOMBA | Kembang Mekar | √ | - |
| 80 | SAMBALI | Batu Payung | √ | - |
| 81 | LAMANTU | Pasimarannu Sejahtera | √ | - |
| **Jumlah** | | | | **57** | **24** |
| *Sumber Data : Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan, dan sosial Budaya, DISPMD Tahun 2024* | | |  |  |  |
|  |  |  |

* Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan output kegiatan Pengukuhan Kembali Jabatan kepala desa terpilih dapatkan Penambahan Masa Jabatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendapatkan Penambahan Masa Jabatan Masa Bakti 2018–2024 dan 2019-2025, masing masing sebanyak 13 dan 53 Kepala Desa.

1. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat**

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.184.141.700,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.179.999.400,( Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah atau 99,65% dengan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.16.624.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.619.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 81,92%, dengan output 20 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya dari 5 Desa
2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepa Guna, dengan anggaran sebesar Rp.12.517.700,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.890.800,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 94,9%, dengan output kegiatan, 10 Kelompok TTG yang difasilitasi tepatnya di Desa Tamalanrea, Desa Kaburu, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa Tanete, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, dan Desa Bonea Timur
3. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp.1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.154.489.600,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 99,69%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Pada Tabel 2.2 berikut, dapat dilihat secara terinci Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 2.3**

**Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tahun Anggaran 2024**

| **No.** | **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.831.800.000** | **3.604.542.416** | **94,07** |  |
|  | **Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah** | **22.995.500** | **17.017.100** | **74,01** |  |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 10.955.000 | 7.148.000 | 65,01 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.000.000 | 1.657.200 | 82,86 |  |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.000.000 | 1.591.400 | 79,57 |  |
| 4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.000.000 | 1.659.300 | 82,97 |  |
| 5. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.000.000 | 1.716.800 | 85,84 |  |
| 6. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 1.598.800 | 79,94 |  |
| 7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 1.654.800 | 82,28 |  |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.819.460.000** | **1.639.667.800** | **90,11** |  |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.815.600.000 | 1.636.388.430 | 90,33 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000 | 1.623.900 | 81,20 |  |
| 3. | Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.000.000 | 1.654.800 | 83,68 |  |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **0** | **0** | 0 |  |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **246.893.500** | **238.585.210** | **96,63** |  |
| 1. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.108.700 | 25.194.000 | 83,68 |  |
| 2. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.685.200 | 1.496.600 | 88,81 |  |
| 3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | 7.781.000 | 5.164.900 | 66,38 |  |
| 4. | Fasilitas Kunjungan Tamu | 1.968.000 | 1.968.000 | 100 |  |
| 5. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205.350.600 | 204.761.710 | 99,71 |  |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **30.000.000** | **29.100.000** | **97** |  |
| 1. | Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya | 30.000.000 | 29.100.000 | 97 |  |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **198.032.000** | **184.587.387** | **93,04** |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | 84.032.000 | 75.606.490 |  |  |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.000.000 | 108.980.897 | 89,97 |  |
|  | **Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **88.279.000** | **73.620.000** | **83,33** |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.130.000 | 37.431.000 | 91,01 |  |
| 2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.480.000 | 27.309.000 | 79,20 |  |
| 3. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.470.000 | 690.500 | 15,45 |  |
| 4. | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8.199.000 | 8.189.500 | 99,88 |  |
|  | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | **245.858.300** | **241.965.800** | **98,41** |  |
|  | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **245.858.300** | **241.965.800** | **98,41** |  |
| 1. | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 49.893.000 | 49.432.500 | 99,08 |  |
| 2. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 10.528.000 | 9.737.000 | 92,49 |  |
| 3. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 14.579.000 | 13.773.000 | 94,47 |  |
| 4. | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 20.858.300 | 19.023.300 | 91,20 |  |
| 5. | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 150.000.000 | 150.000.000 | 100 |  |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **1.184.141.700** | **1.179.999.000** | **99,65** |  |
|  | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.184.141.700** | **1.179.999.000** | **99,65** |  |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 16.624.000 | 13.619.000 | 81,92 |  |
| 2. | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 12.517.700 | 11.890.800 | 94,9 |  |
| 3. | Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.155.000.000 | 1.154.489.600 | 99,96 |  |
|  | ***JUMLAH*** | **3.831.800.000** | **3.604.542.416** | **94,07** |  |

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.4**

**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **NO** | **URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5=(4/3)\*100** | **6** |
| **1** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |
|  | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |
| 1. | Nilai SAKIP OPD | - | B | Proses | ……….. | ………. |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) | % | 77,8% | 84,63 | 108,77% | Tercapai |
| 3. | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | - | Sesuai SAP | Proses | Proses | Tercapai |
| 4. | Persentase Desa yang meningkat statusnya | % | 12,34% | 18,51% | 150 % | Tercapai |
| 4.1 | Persentase Desa Berstatus Desa Sangat Tertinggal | % | 0 | 0 | 100 % | Tercapai |
| 4.2 | Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal | % | 7,4% | 7,41% | 100 % | Tercapai |
| 4.2 | Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang | % | 58% | 44,44% | 76,62% | Tercapai |
| 4.4 | Persentase Desa Berstatus Desa Maju | % | 27,2% | 20,99% | 77,16 % | Tercapai |
| 4.5 | Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri | % | 7,4% | 27,17% | 367,2 % | Tercapai |

Berdasarkan table 3.3 di atas, diketahui bahwa :

1. Pada saat penyusunan laporan ini, untuk nilai SAKIP 2024 masih dalam proses sehingga belum diketahui realisasinya. Untuk Nilai SAKIP OPD Tahun 2023 telah memenuhi target yakni dari kategori CC di tahun 2022, meningkat menjadi B.
2. Indeks Kepuasan Maksyarakat (Pelayanan Publik)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada jenis layanan dan kualitas layanan. Jenis pelayanan yang menjadi objek penilaian sesuai dengan fungsi layanan yang terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa tersebut dalam kaitannya dengan survey tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2024 yaitu layanan (1) Surat keterangan/rekomendasi, (2) layanan Dokumen/Data dan informasi, (3) Konsultasi tentang pencairan dana, (4) Pemberdayaan masyarakat/perempuan dan SDM. (5) tanda tangan SPPD, surat keterangan dan rekomendasi.

Sedangkan untuk kualitas layanan dilakukan penilaian kepuasan terhadap beberapa unsur yaitu 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, (2) Kemudahan prosedur/alur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, (5) Kesesuaian Jenis layanan, (6) Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, (8) Kualitas sarana dan prasarana, dan (9) Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Target IKM pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian kualitas layanan terhadap semua unsur pelayanan yang diberikan oleh Dinas PMD dan apa yang dirasakan responden dalam menerima layanan tercapai (target 2024: 77,8) dimana tingkat kualitas layanan (nilai rata-rata) sebesar 84,63 (kategori baik), dan juga meningkat jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,13 %, dimana dilai pada tahun 2023 sebesar 78,5 (kategori baik).

1. Laporan Keuangan OPD tahun 2024 dengan target sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sampai saat ini masih dalam proses penyusunan laporan.
2. Persentase Desa yang meningkat statusnya

Pada tahun 2024 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 12,34% atau sebesar 10 desa yakni sebesar 17,28% atau sebanyak 14 desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Analisis Jumlah Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Tahun 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Status Desa** | **Target 2024 (%)** | **2023** | **2024** | **Status Tetap (sama dengan tahun 2023** | **Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2023)** | **% Peningkatan (capaian)** |
| 1 | Mandiri | 7,4% | 14 | 22 | 14 | 8 | 27,17 |
| 2 | Maju | 27,2% | 17 | 17 | 13 | 4 | 20,99 |
| 3 | Berkembang | 58% | 42 | 36 | 34 | 2 | 44,44 |
| 4 | Tertinggal | 7,4% | 8 | 6 | 6 |  | 7,41 |
| 5 | Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 |
|  | Jumlah | **100** | **81** | **81** | **81** | **14** | **100,00** |

1. Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Sejak tahun 2022-2024 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini sesuai target 0% yang diharapkan, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal atau tidak ada desa yang menurun statusnya dari desa tertinggal kembali menjadi desa sangat tertinggal.

1. Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa tertinggal pada tahun 2024 sebanyak 6 desa atau sebesar 7,4% (mencapai target), dimana target capaian untuk tahun 2024 sebesar 7,4%, atau sebanyak 6 desa. 6 desa dimaksud yaitu Desa Komba-Komba, Latondu, tarupa, Pulau madu, Karumpa dan Garaupa Raya,

1. Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang

Persentase Desa Berkembang pada tahun 2024 sebesar 44,44% atau sebesar 36 desa. Pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 42 desa. Terdapat 2 desa tertinggal yang meningkat statusnya desa berkembang, dan terdapat masing-masing 4 desa berkembang meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri.

1. Persentase Desa Berstatus Desa Maju

Jumlah Desa Maju Pada Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 17 Desa atau sebesar 20,98%, dikarenakan 4 desa maju di tahun 2023 diantaranya meningkat statusnya menjadi desa mandiri, serta terdapat tambahan 4 desa baru dengan status berkembang di tahun 2023 menjadi desa maju di tahun 2024.

1. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2024 melampaui target, dimana untuk tahun ke- Empat periode RPJMD ditargetkan 6 desa mandiri atau sebesar 7,4%, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini dikabupaten kepulauan selayar, desa mandiri meningkat menjadi 22 desa atau sebesar 27,16%.

1. Desa Barugaia, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,9162 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,9162, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
2. Desa Patilereng terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8244 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8244, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
3. Desa patikarya kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8273 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,844, Dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan ekonomi.
4. Desa Harapan terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7757 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8337, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
5. Desa Bontosunggu terletak di kecamatan bontoharu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8671 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8729, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
6. Desa Tanete terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8197 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8197, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
7. Desa Bungaiya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8181 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8181, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
8. Desa Bontona saluk terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,917 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,917, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
9. Desa Onto terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,921, dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,921, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
10. Desa Maharayya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,9338 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,8432, tapi masih tetap pada rentang indeks desa mandiri, dimana penurunan terjadi pada semua dimensi yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.
11. Desa Tamalanrea terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8686 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8686, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
12. Desa Bonerate terletak di kecamatan Pasimarannu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8317 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8486 dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, dan indeks ketahanan ekonomi.
13. Desa Bontolempangan terletak di kecamatan Buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,941 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,941, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
14. Desa Mekar Indah terletak di kecamatan buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8678 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8678, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
15. Desa Bontotangga di kecamatan Bontoharu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8062 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8784, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan lingkungan.
16. Desa Pamatata terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,7979 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8697, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi.
17. Desa Parak terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,6335 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8971, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
18. Desa Mare-Mare terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,606 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8503, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
19. Desa Bontomarannu terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,7 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,9027, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
20. Desa Binanga Sombaiya terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,6759 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8408, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
21. Desa Lowa terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8154 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,843, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan lingkungan
22. Desa Kembang Ragi terletak di kecamatan pasimasunggu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,739 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,871, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

**Tabel 2.6**

**Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun**

**di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024**

| NO. | STATUS DESA | 2023 | % | 2024 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mandiri | 14 | 17,28 | 22 | 27,17 |
| 2 | Maju | 17 | 20,99 | 17 | 20,99 |
| 3 | Berkembang | 42 | 51,85 | 36 | 44,44 |
| 4 | Tertinggal | 8 | 9,88 | 6 | 7,41 |
| 5 | Sangat Tertinggal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | **Jumlah** | **81** | **100,00** | **81** | **100,00** |

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

**Tabel 2.7**

**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **NO** | **URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5=(4/3)\*100** | **6** |
| **1** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |
|  | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Cakupan penyelenggaraan Penataan Desa Yang difasilitasi | % | 100 (81 Desa) | - | - | - |
|  | 1. Persentase peningkatan Kerjasama Desa | % | 3,7 (3 Desa) | - | - | - |
|  | 1. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi | % | 100 (81 Desa) | 100% (81 Desa) | 100 | Tercapai |
|  | 1. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya | % | 33,33 | 33,33 | 100 | Tercapai |
|  | 1. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. | % | 63,15 % | 48,14 | 76,23% | Tidak Tercapai |

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi

Penataan desa meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), dan aspek kewenangan Desa. Penataan Desa pada tahun 2024 tidak terselenggara di karenakan pada Tahun 2024 Program Penataan Desa tidak dilaksanakan disebabkan keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran yang tersedia menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan diantaranya program penataan desa.

1. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Namun pada tahun 2024 tidak ada peningkatan kerjasama desa (baru) yang terbentuk meskipun telah dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa di 15 Desa.

1. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa dan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya
3. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2024, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari 20 LKD dari 5 Desa. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 10 desa sasaran yaitu : Desa Tamalanrea, Desa Kaburu, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa Tanete, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, dan Desa Bonea Timur, serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan di 81 desa. Target pada tahun 2024 sebesar 33,33% sesuai indikator program pada renstra, dan berdasarkan capaian dari setiap target sub kegiatan, dimana masing-masing mencapai 100%, maka dalam hal ini dapat dikatakan target 33,33% tercapai atau sebesar 100% dari target capaian masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan.
4. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Desa dengan status swasembada merupakan status yang digunakan pada penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terakhir digunakan sampai pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, penilaian status desa berpedoman pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 5 Kategori status desa dengan 3 Dimensi Penilaian yang terdiri dari beberapa indikator penilaian. Terdapat perbedaan indikator penilaian pada IDM dan IPD, sehingga target status desa swasembada (desa maju) pada IPD sebesar 63,15% tidak tercapai, dikarenakan status Desa maju pada IPD belum tentu masuk dalam ketegori desa maju pada IDM, disebabkan perbedaan indikator penilaian, sehingga desa swasembada jika disandingkan dengan desa maju pada IPD persentasenya sangat menurun. Untuk memperoleh nilai persentase desa swasembada dengan melihat Indeks Desa Membangun, dengan asumsi desa maju dan desa mandiri sebagai desa swasembada, maka untuk tahun 2024 terdapat 39 desa swasembada atau sebesar 48,14% yang terdiri dari 17 Desa Maju (Desa Kayu Bauk, Desa Barat Lambongan , Desa Menara Indah, Desa Polebunging, Desa Bonea Timur, Desa Kaburu, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Appatanah, Desa Khusus Bahuluang, Desa Majapahit, Desa Ujung, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Balang Butung, Desa Kohala, Desa Buki Timur) dan 22 desa mandiri (Desa Bontosunggu, Desa Bontotangga, Desa Pamatata, Desa Tanete, Desa Bungaiya, Desa Bontona Saluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Parak, Desa Barugaiya, Desa Mare-Mare, Desa Bontomarannu, Desa Harapan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Binanga Sombaiya, Desa Lowa, Desa Kembang Ragi, Desa Bonerate, Desa Bontolempangan, Desa Mekar Indah), sehingga terdapat peningkatan sebesar 9,87% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 38,27%

1. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

**Tabel 2.8**

**Matriks Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **No.** | **UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah** | **Target Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Capaian Realisasi Anggaran (%)** | **Jumlah Indikator Kinerja Program** | **Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)** | **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan** | **Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4-3** | **6=(4/3)\*100** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp. 3.831.800.000,- | Rp. 3.604.542.416,- | Rp. 227.257.584,- | 94,07 | 4 | 100% | 10 | 100% |

Anggaran Pokok DISPMD pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.831,800.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.604.542.416,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), atau sekitar 94,07%.

1. **Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah**

**Tabel 2.9**

**Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| **No** | **Kebijakan Strategis** | **Dasar Hukum** | | **Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan** | **Ket.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor/**  **Tanggal Pengesahan** | **Tentang** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa | Nomor : 61 Tahun 2024, Tanggal 26 Januari 2024 | Tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 | Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar | SK Bupati |
| 2. | Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa | Nomor : 16 Tahun 2024, Tanggal 29 Februari 2024 | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2024 | Sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes. | Perbup |
| 3. | Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa | Nomor 54 Tahun 202429 , tanggal 29 November 2024 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa | Sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar | Perbup |

1. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 2.10**

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati tahun Anggaran 2023**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tahun 2024**

| **No.** | **Rekomendasi DPRD** | **Tindak Lanjut** | **Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** |
| 1. |  | N I H I L |  |

**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menerima atau memberikan tugas pembantuan.**

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A. 2024, pada umumnya berjalan dengan baik, dengan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD …….. (Proses).
2. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Maksyarakat (Pelayanan Publik) tahun 2024 diatas target yakni sebesar 84,63% dengan target sebesar 77,8%,
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntasi Pemerintah), dengan asumsi mencapai target.
4. Capaian Persentase Peningkatan status Desa pada tahun 2024 jauh melampaui target (12,34% atau sebanyak 10 desa) yakni sebesar 17,28% atau sebanyak 14 desa.
5. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100% (sesuai target)
6. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 33,33% (sesuai target).

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 31 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

**IRWAN BASO, S. STP**

NIP. 19800422 199912 1 003